

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan akuntansi sektor publik di Indonesia semakin cepat dalam melakukan kegiatan otonomi daerah. Pemerintah daerah yang merupakan pemegang Amanah wajib untuk memberikan tanggungjawab, melaporkan, menyajikan dan mengungkapkan kegiatan-kegiatan untuk memberi tanggungjawab untuk pihak pemberi perintah. Pertanggungjawaban ini adalah laporan keuangan atas pelaksanaan dana pemerintah untuk dipertanggungjawabkan kepada pemerintah pusat dan masyarakat.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Laporan Keuangan yang berkualitas adalah laporan yang memiliki karakteristik yang relevan, andal, dapat dibandingkan serta dapat dipahami. Relevan yaitu informasi yang termuat didalamnya dapat mempengaruhi Keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini dan memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka dimasa lalu. Andal yaitu informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian dan menyesatkan dan kesalahan yang material, menyajikan setiap fakta yang jujur, serta dapat diverifikasi. Dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Dapat dipahami dalam artian dapat dimengerti oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud.

Untuk mengukur berhasil atau tidaknya perspektif pengelolaan keuangan sebuah organisasi pemerintah dilihat dari pengelolaan keuangan yang baik yang dapat memberikan kepastian suatu kegiatan yang nantinya pemerintah akan melakukan macam-macam usaha dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dan transparasi. Maka dari itu sangat penting untuk melaporkan

laporan keuangan yang berkualitas. Pelaporan keuangan yang berkualitas akan menghasilkan output berupa informasi keuangan yang berguna untuk pengambilan Keputusan.

Selain itu hal yang mendasar memengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah adalah penerapan sistem akuntansi berdasarkan standar akuntansi pemerintahan daerah yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas dan keandalan pengelolaan keuangan pemerintah melalui penyusunan dan pengembangan standar akuntansi pemerintah. Penerapan standar akuntansi di dalam penyusunan laporan keuangan daerah salah satunya adalah sistem akuntansi. Menurut Permendagri No. 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan bahwa sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah meliputi serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer. Keberadaan suatu sistem akuntansi menjadi sangat penting karena fungsinya dalam menentukan kualitas informasi pada laporan keuangan.

Pada hakikatnya pemerintahan harus memahami dan menguasai tentang sistem akuntansi, karena sistem akuntansi pada dasarnya merupakan sistem pengolahan informasi yang menghasilkan keluaran berupa informasi akuntansi. Menurut Bastian (2006) bahwa sistem akuntansi memberikan pengetahuan tentang pengolahan informasi sejak data direkam dalam dokumen. Sistem akuntansi merupakan sistem pembagian kekuasaan dalam organisasi perusahaan melalui pemrosesan data keuangan, mulai dari catatan akuntansi sampai dengan penyajian informasi dalam laporan keuangan.

Pemerintah juga terus berupaya melakukan perubahan dalam segala aspek demi tercapainya kemakmuran Negara, terutama perubahan dalam mengelola keuangan Negara yang lebih transparansi dan dapat memperbaiki efektifitas dana efisiensi publik. Salah satu perubahan yang dilakukakn adalah penerapan akuntansi berbasis akrual pada instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010).

Suatu instansi juga membutuhkan suatu Sistem Pengendalian Internal (SPI) yang kuat untuk mencapai tujuan suatu organisasi. Sistem Pengendalian Internal yang kuat tentunya akan meningkatkan kualitas laporan keuangan OPD. Sistem Pengendalian Internal adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Keterkaitan sistem akuntansi dan sistem pengendalian internal yaitu sistem pengendalian internal harus mendukung sistem akuntansi dalam menciptakan laporan keuangan yang andal. Keduanya harus berjalan beriringan, sistem informasi akuntansi yang berisi metode dan prosedur harus mendukung struktur pengendalian internal. Pengendalian internal membantu mencegah dan mendeteksi ketidakpatuhan yang dapat memengaruhi keandalan laporan keuangan. Jadi, sistem akuntansi dan sistem pengendalian internal saling melengkapi untuk memastikan integritas dan keandalan informasi keuangan dalam organisasi.

Pemerintah daerah Kabupaten Jember diminta untuk meningkatkan kinerja Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Jember pada saat pengesahan APBD 2024 agar performa OPD tahun depan lebih optimal. Saat memasuki realisasi APBD tahun depan, diminta agar APBD dijalankan sebagaimana 9 prinsip. Seperti akuntabilitas, partisipasi masyarakat, transparansi, efisiensi dan efektivitas, kesetaraan, tegaknya supermasi hukum, visi strategis, responsif, dan berorientasi pada konsensus.

Berdasarkan latar belakang yang dijelaskan diatas, maka peneliti tertarik untuk mengambil judul **“PENGARUH SISTEM AKUNTANSI DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN (STUDI PADA SELURUH DINAS DI KABUPATEN JEMBER)”**